

Katalog : 4601003.52

ISSN 2746-5128

# STATISTIK POLITIK

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## 2023

Volume 8, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

# STATISTIK POLITIK

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**2023**

Volume 8, 2024

<https://ntb.bps.go.id>



# Statistik Politik

## Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023

Volume 8, 2024

**Katalog BPS** : 4601003.52  
**ISSN** : 2746-5128  
**No. Publikasi** : 52000.24048

**Ukuran Buku** : 17,6 x 25 cm  
**Jumlah Halaman** : xii+ 55 halaman

**Penyusun Naskah:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Penyunting:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Desain Tata Letak:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Diterbitkan Oleh:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat*

# **TIM PENYUSUN**

**Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023**

Volume 8, 2024

**Pengarah :**

Drs. Wahyudin, M.M

**Penanggung Jawab :**

M. Ikhsany Rusyda, SST, M.Si

**Penulis Naskah :**

Sri Sundari, SST

Yati Daryati Nurmalasari, SST

**Pengolah Data :**

Sri Sundari, SST

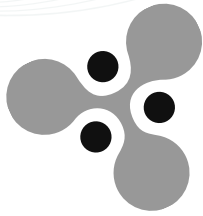
**Gambar Kulit :**

Sri Sundari, SST

**Penyunting :**

1. Gusti Ketut Indradewi, SST, M.Sc
2. Rika Verlita, SST
3. Isna Zuriatina, SST, MT





# KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS Provinsi NTB) berupaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Hal ini juga tidak terlepas dari tugas BPS untuk penyediaan dan publisitas data beragam dan berkualitas merupakan hal yang tak terelakkan lagi dimasa mendatang, sehingga BPS berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan seri publikasi tahunan BPS yang menyajikan data terkait gambaran umum politik di NTB. Data-data yang disajikan bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan 2023, serta bersumber dari beberapa instansi seperti Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Bakesbangpoldagri.

Untuk memenuhi kebutuhan pengguna data, publikasi Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat menyajikan data-data tahun 2023 seperti tingkat partisipasi politik, produk perundangan, demokrasi, dan sebagainya. Data-data pemilu legislatif tahun 2019 tetap ditampilkan dikarenakan belum adanya data pemilu legislatif dan pemilukada terbaru. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan data, publikasi statistik Politik akan terus mengalami penyempurnaan, baik struktur maupun muatan.

Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini sangat diharapkan agar penyusunan berikutnya lebih sempurna.

Mataram, September 2024  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Wanyudin**



# ABSTRAKSI

Pesta demokrasi merupakan hal yang ditunggu oleh masyarakat karena pilkada dan pemilu legislatif merupakan salah satu ajang yang ditunggu oleh masyarakat untuk memilih sendiri pemimpinnya. Situasi politik di NTB dapat digambarkan diantaranya dengan hasil pemilu legislatif dan pemilukada yang terakhir dilaksanakan yaitu pada tahun 2019. Untuk pemilu legislatif di tingkat provinsi, hasil perolehan suara terbanyak diraih Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bintang Restorasi. Jumlah penduduk Provinsi NTB yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 3.499.265 jiwa, 70,05 persen diantaranya menggunakan hak pilih dan 29,95 persen golput. Dari jumlah perolehan suara tersebut 95,53 persen suara dinyatakan sah dan 4,47 persen suara tidak sah.

Jumlah peraturan daerah (perda) yang dihasilkan DPRD Provinsi pada tahun 2023 sebanyak 28 perda target propemperda dengan 2 perda yang disahkan. Jumlah ini turun dibandingkan tahun sebelumnya dengan 9 perda hasil inisiatif DPRD yang disahkan. Dilihat dari keterlibatan perempuan dalam parlemen, di DPRD Provinsi NTB, keterlibatan perempuan hanya sebesar 1,56 persen yang juga merupakan nilai terendah dibandingkan dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Jumlah ormas

dan LSM yang terdaftar di Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sampai tahun 2023 sebanyak 443 organisasi.

Kemudian pada tahun 2024, pemilu akan kembali digelar. Persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 sudah dilakukan sejak tahun 2022. Pada tahun 2024 pemilu akan dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif secara bersamaan. Pada pemilu tahun 2024 akan diikuti oleh 24 partai politik yang telah ditetapkan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum.

Demokrasi merupakan bagian dari sistem politik yang memberikan keadilan dan persamaan hak bagi semua warga negara yang dihitung dengan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Sejak tahun 2021 penghitungan IDI untuk telah mengadopsi metode baru, oleh karena itu, nilai ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai IDI NTB pada tahun 2023 adalah sebesar 70,03 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 (73,38) dan tahun 2021 (72,69). Turunnya nilai IDI NTB tahun 2023 ini lebih disebabkan oleh turunnya nilai indikator 2 yaitu terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat dari 60,54 pada tahun 2022 menjadi 9,60 pada tahun 2023.

DAFTAR ISI

Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023  
Volume 8, 2024

Kata Pengantar ..... v

Abstraksi ..... vii

Daftar Isi ..... ix

Daftar Gambar ..... x

Daftar Tabel ..... xi

BAB I. Pendahuluan..... 1

    1.1 Latar Belakang ..... 1

    1.2 Maksud dan Tujuan ..... 3

    1.3 Ruang Lingkup ..... 4

    1.4 Sistematika Penyajian ..... 4

BAB II. Metodologi ..... 5

    2.1 Jenis dan Sumber Data..... 5

    2.2 Konsep dan Definisi ..... 5

BAB III. Gambaran Umum Provinsi NTB..... 9

BAB IV. Gambaran Umum Politik NTB ..... 11

    4.1 Pemilu Legislatif Terakhir ..... 11

    4.2 Peran DPRD ..... 12

    4.3 Menyongsong Pemilu 2024..... 15

    4.4 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019..... 21

    4.5 Organisasi Masyarakat (Ormas) atau LSM ..... 24

    4.6 Perkembangan Demokrasi di NTB..... 26

LAMPIRAN ..... 25

## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                                                                              |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.1 | Jumlah Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2023 .....                                  | 14 |
| Gambar 4.2 | Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB Tahun 2022-2023.....         | 15 |
| Gambar 4.3 | Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB Tahun 2023.....             | 16 |
| Gambar 4.4 | Perolehan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Menurut Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2019..... | 24 |
| Gambar 4.5 | Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau LSM Menurut Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2023.....                  | 25 |
| Gambar 4.6 | Perkembangan Indeks Demokrasi NTB, 2009 – 2020 .....                                                         | 28 |
| Gambar 4.7 | Nilai Indeks Demokrasi NTB, 2021 – 2023 .....                                                                | 29 |

# DAFTAR TABEL

|          |                                                                                                                                                                               |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. | Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.....                                                                           | 33 |
| Tabel 2. | Jumlah PAW Anggota DPRD Menurut Alasan Berhenti pada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 .....                                           | 34 |
| Tabel 3. | Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 .....                                                   | 35 |
| Tabel 4. | Jumlah Peraturan Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2023 .....                                                                                               | 36 |
| Tabel 5. | Jumlah Kegiatan Kaderisasi Partai Politik yang Tercatat di Bakesbangpol Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2023 .....                                               | 37 |
| Tabel 6. | Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019 .....     | 38 |
| Tabel 7. | Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019 ..... | 39 |
| Tabel 8. | Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019 .....    | 40 |
| Tabel 9. | Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019 .....                                                | 41 |

|           |                                                                                                                                                                      |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 10. | Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019 .....                            | 42 |
| Tabel 11. | Jumlah Pemilih Pada Pemilu 2024 Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin.....                                                                                              | 43 |
| Tabel 12. | Jumlah Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024 Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin.....                                                                                  | 45 |
| Tabel 13. | Jumlah Calon Tetap Anggota DPR RI Pada Pemilu 2024 Menurut Partai .....                                                                                              | 47 |
| Tabel 14. | Jumlah Dapil Pada Pemilu 2024 Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin .....                                                                                               | 48 |
| Tabel 15. | Jumlah Kursi Pada Pemilu 2024 Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin.....                                                                                                | 50 |
| Tabel 16. | Daftar Kepala Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2023 .....                                                                                         | 52 |
| Tabel 17. | Jumlah Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang Mendaftar dan Total Terdaftar di Bakesbangpoldagri Provinsi dan Kabupaten/Kota NTB Tahun 2023..... | 53 |
| Tabel 18. | Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTB Tahun 2021-2023 .....                                                                                     | 54 |

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Kondisi politik yang stabil merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Stabilitas situasi politik akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Berbagai perubahan sistem politik yang terjadi di Indonesia menciptakan perbedaan yang signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Ketika reformasi 1998 bergulir dan mengakhiri masa orde baru, situasi politik nasional pun mengalami tuntutan serupa untuk berubah dan berbenah. Kekuasaan penyelenggaraan negara yang sebelumnya berjalan tersentral di pusat pada masa orde baru, perlahan mengalami perubahan untuk mengakomodir tuntutan reformasi. Tuntutan pendistribusian kekuasaan tersebut terjadi dalam 2 level, horizontal dan vertikal. Di level horizontal, lembaga-lembaga negara diluar eksekutif diperkuat agar dapat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Di level vertikal, adanya pemberlakuan otonomi daerah yang mendelegasikan berbagai kewenangan yang sebelumnya merupakan otoritas pusat sehingga bisa dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Perubahan-perubahan situasi politik tersebut juga terjadi di Nusa Tenggara Barat. Berbagai kepentingan dalam masyarakat diberikan

ruang untuk menyalurkan aspirasinya, diantaranya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik di daerah. Secara umum, partai-partai politik yang bermunculan di daerah merupakan kepanjangan dari parpol di pusat.

Selain itu, perubahan budaya politik yang semakin terbuka juga menjadi aspek yang penting. Media cetak ataupun elektronik menjadi leluasa memberikan kritik terhadap pemerintah. Organisasi-organisasi masyarakat baru bermunculan sebagai wadah masyarakat menyampaikan kepentingannya. Kebebasan menyalurkan pendapat dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan.

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik.

Diantara isu penting yang muncul adalah tuntutan peningkatan keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diatur bahwa partai politik harus mencalonkan sekurang-kurangnya 30 persen calon perempuan dalam daftar calon legislatif. Ini bertujuan untuk memastikan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Perkembangan bidang politik yang demikian cepat seringkali berimbas, baik langsung maupun tidak, terhadap kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi politik yang kondusif merupakan langkah strategis yang perlu terus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Publikasi Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023 ini disusun untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik secara berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan perkembangan politik di NTB. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran makro mengenai situasi politik masyarakat NTB. Tujuan khususnya adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik hasil pemilukada terakhir di Kabupaten/kota dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan pembangunan politik dan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan demokrasi di NTB.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Publikasi Statistik Politik Provinsi NTB 2023 menyajikan gambaran politik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi di wilayah NTB.

### **1.4 Sistematika Penyajian**

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam tiga bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi. Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi dan penjelasan teknis tentang statistik/indikator yang disajikan. Bab III menjelaskan gambaran umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bab terakhir adalah menyajikan gambaran umum politik (Bab IV).

# BAB II

## Metodologi

### 2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data BPS dan data sekunder dinas/instansi dengan cara kompilasi hasil registrasi/catatan. Data BPS berasal dari hasil proyeksi penduduk, dan Indeks Demokrasi Indonesia sedangkan data dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Polres/Polresta/Polda, KPU, Bakesbangpoldagri, dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikumpulkan melalui Survei Politik dan Keamanan.

### 2.2 Konsep dan Definisi

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

#### **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

## **Partai Politik**

Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

## **Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8/2012).

## **Peserta Pemilu Legislatif**

Peserta pemilu legislatif adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

## **Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004).

## **Golongan Putih**

Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

## **Warga Negara Indonesia**

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).

## **Pemilih**

Pemilih adalah warga Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

## **Partisipasi Penduduk Dalam Pemilu**

Partisipasi Penduduk Dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

## **Partisipasi Politik**

Partisipasi Politik adalah keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan. Partisipasi politik digolongkan menjadi 2, konvensional seperti memilih dalam pemilu atau diskusi-diskusi politik, serta nonkonvensional seperti demonstrasi dan mogok.



# **BAB III**

## **Gambaran Umum**

### **Provinsi NTB**

Secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak pada  $115^{\circ}46'$  –  $119^{\circ}5'$  Bujur Timur dan  $8^{\circ}10'$  –  $9^{\circ}5'$  Lintang Selatan. NTB merupakan salah satu provinsi dan berada di kawasan Timur Indonesia, yang terletak diantara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTB dikenal sebagai daerah Bumi Gora (Gogo-Rancah) artinya bumi yang dapat ditanami padi baik di daerah kering maupun di daerah basah.

Letak NTB yang berbatasan langsung dengan daerah tujuan wisata dunia yaitu Provinsi Bali, sedikit banyak memberi dampak terhadap kegiatan pariwisata di NTB. Banyak kawasan wisata alam di Provinsi NTB yang sangat bagus pemandangan alam dan pantainya. Seperti: Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Pantai Senggigi, Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Pantai Kuta, Pantai Lakey dan obyek wisata lainnya.

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai  $20.164,84 \text{ km}^2$ , terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta ratusan pulau-pulau kecil. Luas Pulau Sumbawa mencapai tiga kali luas Pulau Lombok. Sebanyak 280 pulau terdapat di Provinsi NTB dan baru 32 pulau yang berpenghuni. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan 117 kecamatan dan 1.166 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa mempunyai jumlah kecamatan

yang paling banyak, yaitu 24 kecamatan dan kabupaten yang paling banyak mempunyai jumlah desa/kelurahan, yaitu Kabupaten Lombok Timur sebanyak 254 desa/kelurahan.

Persebaran penduduk di NTB tampak tidak merata baik antarpulau maupun kabupaten/kota. Penduduk lebih banyak bertempat tinggal di Pulau Lombok dibandingkan Pulau Sumbawa. Penduduk terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur yaitu 1.391.382 jiwa dan yang terendah adalah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 152.948 jiwa. Dengan luas wilayah yang lebih sempit, Pulau Lombok dihuni oleh 3,93 juta jiwa atau sekitar 70,75 persen dari jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat dan pulau Sumbawa yang lebih luas hanya dihuni oleh sekitar 1,63 juta jiwa atau 29,25 persen dari jumlah penduduk NTB.

# **BAB IV**

## **Gambaran Umum Politik NTB**

### **4.1 Pemilu Legislatif Terakhir**

Dinamika politik di Indonesia juga dirasakan di NTB. Hal ini tercermin dari banyaknya partai politik yang mendapat kursi di DPRD baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat NTB. Di tingkat provinsi, hasil perolehan suara pemilu legislatif 2019 sesuai urutan dari terbanyak adalah sebagai berikut: Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Tabel 2 menyajikan data tentang jumlah PAW Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah proses penggantian anggota legislatif yang telah berhenti atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. PAW dapat terjadi di berbagai tingkatan legislatif, termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PAW di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 adalah 17 anggota, dengan rincian 3 anggota karena mengundurkan diri, 3 anggota karena meninggal dan 11 karena diberhentikan.

Dua kabupaten/kota dengan jumlah anggota DPRD terbanyak di NTB adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah dengan masing-masing anggota sebanyak 50 orang. Dari keterwakilan perempuan di legislatif, semua Kabupaten/Kota memiliki anggota perempuan. Anggota DPRD perempuan terbanyak tahun 2023 adalah di DPRD Kota Mataram.

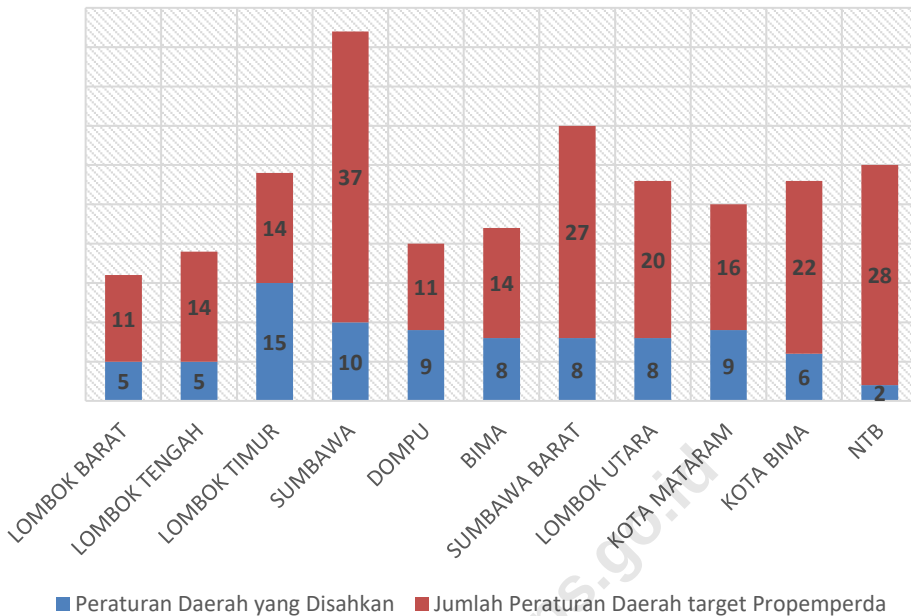
## **4.2 Peran DPRD**

DPRD memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangan dalam hal anggaran daerah, dan fungsi pengawasan berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Salah satu peran DPRD adalah menyusun peraturan daerah (perda). Hal ini diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap daerah harus memiliki program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang direncanakan dan disepakati antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) setiap tahunnya. Propemperda bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Perda yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung program pembangunan daerah.

Pada tahun 2023, Jumlah Peraturan Daerah target Propemperda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 28 target dan hanya 2 Peraturan Daerah yang disahkan.

Dalam gambar 4.1 terlihat bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki target Propemperda paling tinggi yaitu sebanyak 37, tetapi hanya 10 peraturan daerah yang disahkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan dalam menyelesaikan target pembentukan peraturan daerah, misalnya keterbatasan sumber daya, hambatan dalam pembahasan, atau prioritas yang berubah. Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat memiliki target Propemperda yang tinggi, masing-masing 37 dan 27, meskipun jumlah Perda yang disahkan lebih rendah. Hal ini bisa menandakan bahwa daerah tersebut memiliki kebutuhan yang lebih mendesak atau kompleks untuk merancang berbagai regulasi untuk mendukung pembangunan daerahnya.

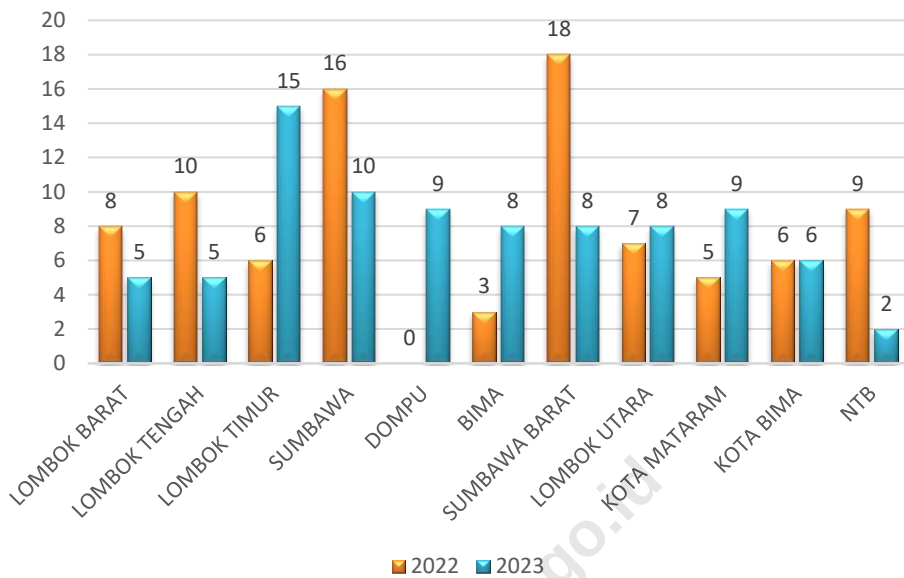
Di sisi lain, terdapat kabupaten/kota dengan target yang relatif lebih rendah, seperti: Kabupaten Dompu dengan 11 target, 9 yang disahkan. Kota Mataram dengan 16 target, 9 yang disahkan. Daerah-daerah ini mungkin memiliki program pembangunan yang lebih terkonsentrasi, sehingga jumlah regulasi yang dibutuhkan lebih sedikit. Namun, Kabupaten tersebut masih bisa dianggap cukup efisien dalam mencapai target karena jumlah Perda yang disahkan mendekati atau cukup signifikan dibandingkan dengan target.



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

**Gambar 4.1 Jumlah Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2023**

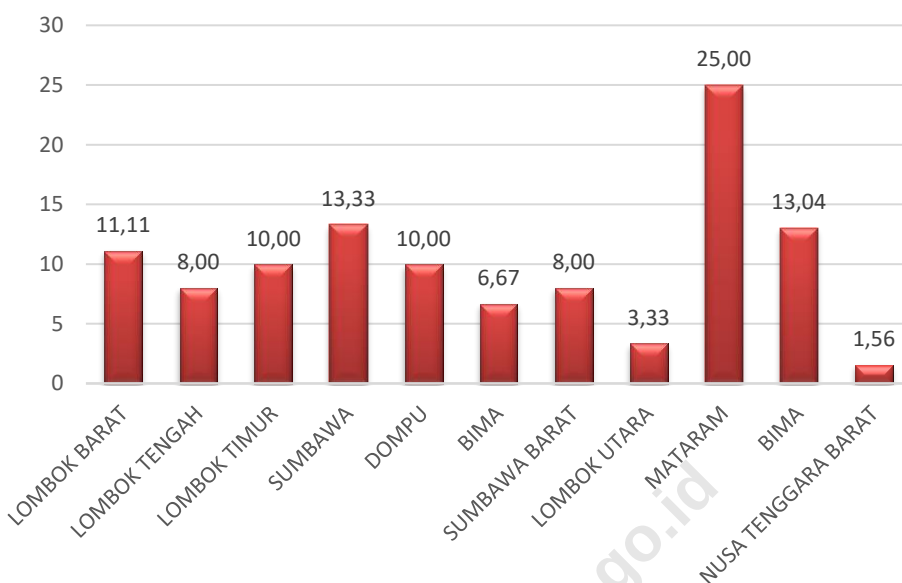
Sepanjang tahun 2022-2023, secara total jumlah perda yang dihasilkan dari DPRD yang ada di provinsi NTB cenderung mengalami kenaikan. Meskipun demikian, jika dilihat pada masing-masing kabupaten/kota, terdapat 4 kabupaten/kota yang mengalami penurunan yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya, DPRD yang menghasilkan peningkatan jumlah perda terbanyak adalah DPRD Kabupaten Lombok Timur dan DPRD Kabupaten Dompu, yaitu masing-masing meningkat 9 perda jika dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan jumlah perda yang dihasilkan diharapkan sejalan dengan peningkatan kualitas terhadap perda yang dihasilkan tersebut.



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

**Gambar 4.2 Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB Tahun 2022-2023**

Selain dari jumlah peraturan yang dihasilkan, dari DPRD juga dapat dilihat peran perempuan dalam parlemen, yang dapat dilihat dari banyaknya anggota perempuan pada DPRD Provinsi NTB maupun Kabupaten/Kota. Keterlibatan perempuan di parlemen di NTB tertinggi adalah di Kota Mataram dan Kota Bima. Kemudian yang terendah adalah di Kabupaten Lombok Utara. Hal ini menggambarkan bahwa peran aktif perempuan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah lebih tinggi di wilayah kota dibandingkan kabupaten.



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

**Gambar 4.3 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB Tahun 2023**

### 4.3 Menyongsong Pemilu 2024

Pada tahun 2024, rakyat Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum dan Pemilu. Pemilu Tahun 2024 merupakan pemilu yang ketigabelas yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Pada awalnya, pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di parlemen. Akan tetapi, setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia yang semula dilakukan oleh MPR, kini dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga jika dilihat berdasarkan Pemilihan Umum Presiden atau Pilpres, tahun 2024 merupakan pemilu kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, pemilu tahun 2024 juga

merupakan pemilu kedua dimana pemilihan legislatif serta presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara serentak.

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum pemilu dilakukan dengan satu putaran, akan tetapi terdapat kondisi pemilu akan dilakukan dengan dua putaran yaitu apabila pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50 persen suara dengan sedikitnya 20 persen suara yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia.

Secara umum pemilu di Indonesia dibagi menjadi 3 periode yaitu pemilu pada periode Soekarno, pemilu pada periode Soeharto, dan pemilu pada periode Reformasi. Pemilu pada periode Soekarno atau pemilu tahun 1955 yang juga merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Selanjutnya pemilu pada periode Soeharto adalah pemilu pada tahun 1971 - 1997. Pada periode ini telah dilakukan sebanyak enam kali pemilu yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan tahun 1997. Pada enam kali pemilu tersebut, seluruhnya dimenangkan oleh partai Golkar. Kemudian periode terakhir yaitu periode reformasi adalah periode pemilu sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang. Pemilu pada periode reformasi ini telah dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Selanjutnya pemilu akan dilaksanakan kembali pada tahun 2024.

Pada pemilu tahun 2024 terdapat 24 partai politik yang akan bersaing. Pada awalnya, terdapat 40 partai politik yang mendaftar ke

KPU, akan tetapi hanya 24 partai politik yang berkas pendaftarannya lengkap dan diterima. Sebanyak 18 partai politik yang memenuhi syarat dan menjadi peserta Pemilu 2024 antara lain:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat (Demokrat)
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Perindo (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat (Ummat)

Khusus pada Provinsi Aceh, terdapat 6 partai politik dengan berkas pendaftaran lengkap dan diterima. Enam partai politik selain partai politik tersebut yaitu:

1. Partai Nangroe Aceh
2. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa
3. Partai Darul Aceh
4. Partai Aceh
5. Partai Adil Sejahtera Aceh
6. Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh

Secara umum, persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 telah dilakukan sejak tahun 2022. Jadwal pemilu tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

| <b>Tanggal</b>                      | <b>Kegiatan</b>                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 14 Juni 2022 - 14 Juni 2024         | Perencanaan Program dan Anggaran                         |
| 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023     | Penyusunan Peraturan KPU                                 |
| 29 Juli - 13 Desember 2022          | Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu |
| 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023      | Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih  |
| 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023   | Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan    |
| 14 Desember 2022 - 14 Februari 2023 | Penetapan Peserta Pemilu                                 |
| 22 Januari 2023                     | Pembentukan Pengawas TPS                                 |
| 1-14 Mei 2023                       | Pencalonan Anggota DPD                                   |

|                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-14 Mei 2023                       | Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota                                                          |
| 15 Mei - 23 Juni 2023               | Proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD |
| 19 - 25 Oktober 2023                | Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden                                                                                  |
| 25 Oktober - 13 November 2023       | Verifikasi Berkas Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Presiden-Wakil Presiden                                          |
| 13 November 2023                    | Pengundian Nomor Urut Calon Presiden dan Wakil Presiden                                                                 |
| 28 November 2023 - 10 Februari 2024 | Masa Kampanye Pemilu                                                                                                    |
| 5 - 14 Februari 2024                | Pemungutan dan Penghitungan Suara Luar Negeri                                                                           |
| 11 - 13 Februari 2024               | Masa Tenang                                                                                                             |
| 14 - 15 Februari 2024               | Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Negeri                                                                           |
| 15 Februari - 20 Maret 2024         | Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara                                                                                    |
| 20 Maret 2024                       | Pengumuman Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum                                                 |
| 21 Maret - 18 April 2024            | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Sidang Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi                   |
| 22 April 2024                       | Hasil Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi                                          |

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 22 April 2024   | Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum |
| 1 Oktober 2024  | Pelantikan Anggota DPR dan DPD                                            |
| 20 Oktober 2024 | Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden                                    |

#### 4.4 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Pemilu terakhir kali diselenggarakan tahun 2019. Pemilu pada tahun 2019 merupakan pertama kali dilakukan pemilihan legislatif serta presiden dan wakil presiden secara serentak. Upaya ini sejalan dengan semangat penyederhanaan pemilu yang digagas sejak beberapa tahun sebelumnya. Pilkada misalnya, telah didesain agar dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Sinkronisasi jadwal pelaksanaan pemilu ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan dari sisi waktu, tenaga, dan biaya.

Secara teknis, Pemilu 2019 juga dilaksanakan dengan beberapa perubahan. Diantaranya adalah penghitungan suara dengan metode *Sainte Lague*, menggantikan metode bilangan pembagi pemilih (BPP) atau *Kuota Hare*, yang telah digunakan pada beberapa pemilu sebelumnya. Untuk mengakomodasi bertambahnya beban petugas pada pemilu serentak, jumlah pemilih di TPS juga diturunkan dari maksimal 500 menjadi 300 pemilih saja. Dengan pengurangan tersebut, jumlah TPS bertambah dari 12.020 pada Pemilu 2014 menjadi 15.989 pada Pemilu 2019.

Selain itu, masa kampanye untuk caleg serta presiden dan wakil presiden juga dibuat lebih panjang, dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019, atau hampir selama tujuh bulan. Pada Pemilu 2014, kampanye untuk pemilihan legislatif mulai 1 Januari hingga 5 April 2014, atau sekitar tiga bulan saja. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pilpres 2014 lebih singkat lagi, hanya satu bulan dimulai pada 4 Juni 2014 dan berakhir pada 5 Juli 2014.

Berdasarkan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum, kursi yang diperebutkan di DPR pada Pemilu 2019 bertambah, dari 560 pada 2014 menjadi 575 kursi. Jumlah partai politik yang berkompetisi juga bertambah. Dari 12 partai politik nasional dan tiga partai lokal Aceh pada Pemilu 2014 menjadi peserta kembali pada Pemilu 2019. Selain itu, terdapat tambahan empat partai nasional baru, yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pada Pemilu 2019, terdapat 3.667.253 jiwa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari seluruh calon pemilih yang terdaftar dalam DPT, 49,11 persen diantaranya laki-laki, sementara 50,89 persen lainnya perempuan. Semua calon tersebar ke dalam 15.989 TPS di 10 kabupaten/kota.

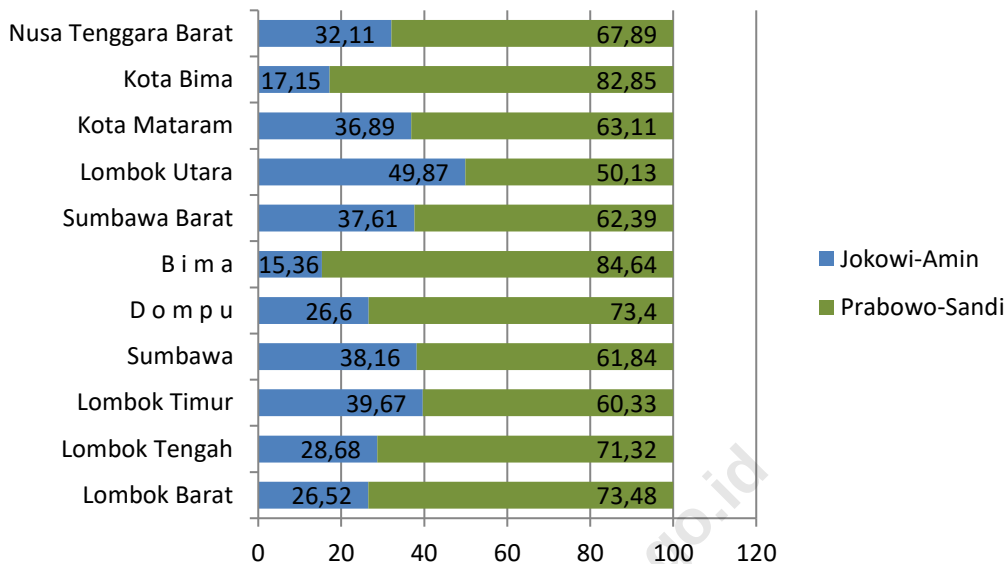
Pada Pemilu 2019, kualitas DPT juga masih terdapat persoalan. Untuk pilpres terdapat 111.347 pemilih yang berasal dari Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK adalah daftar pemilih yang tinggal di sebuah wilayah namun tidak tercatat dalam DPT. Pemilih dari daftar ini baru diperkenankan memilih pada rentang waktu 12.00-13.00 dan tergantung pada ketersediaan surat suara.

Pilpres 2019 diikuti oleh dua pasangan calon (paslon). Paslon nomor urut 01 adalah Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Pasangan ini diusung oleh sepuluh partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai lain yang mendukung tetapi tidak memiliki kursi di parlemen yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sementara itu, paslon nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno. Paslon ini diusung oleh enam partai politik, yaitu: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Partai lain yang mendukung tetapi tidak memiliki kursi di parlemen, yaitu Partai Garuda dan Partai Berkarya.

Di NTB paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno dengan perolehan suara 2.011.319 suara atau sebesar 67,89 persen dari total suara. Sementara itu, paslon nomor urut 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin, memperoleh 951.242 suara atau sebesar 32,11 persen dari total suara.

Paslon nomor urut 02 memenangkan suara di semua kabupaten/kota di NTB. Partisipasi pemilih pada pilpres 2019 sebesar 82,75 persen. Partisipasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat dengan 89,77 persen, sementara terendah di Kabupaten Bima dengan partisipasi sebesar 79,31 persen.

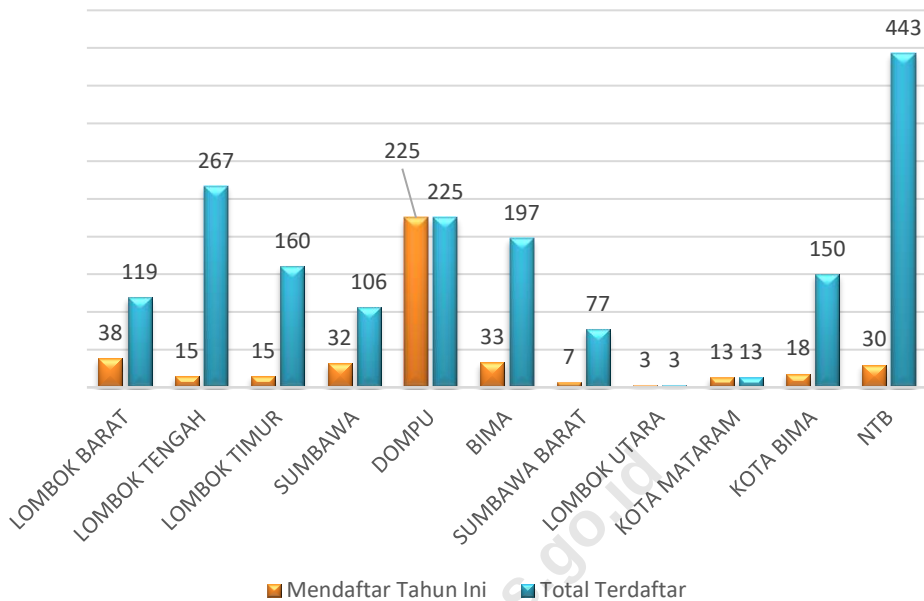


Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Gambar 4.4. Perolehan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Menurut Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2019**

## 4.5 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Ormas dan LSM ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan terutama pada ranah politik. Perkembangan jumlah ormas dan LSM di NTB meningkat, saat ini ada setidaknya 3.700 ormas atau LSM yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Pada tahun 2023 terdapat 30 ormas dan LSM yang mendaftar di Bakesbangpoldagri Provinsi NTB. Sementara itu total yang mendaftar pada tahun 2023 sebanyak 399 ormas atau LSM di seluruh wilayah Provinsi NTB.



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

**Gambar 4.5. Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau LSM Menurut Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2023**

Beberapa faktor yang mendukung perkembangan jumlah ormas atau LSM ini antara lain karena perkembangan di bidang politik, demokrasi, perkembangan ekonomi dan teknologi. Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten yang memiliki ormas atau LSM terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu sebanyak 267 Ormas. Sementara itu, Ormas atau LSM yang paling sedikit adalah yang terdaftar di Kabupaten Lombok Utara yaitu sebanyak 3 Ormas. Ormas atau LSM akan dapat mencapai tujuannya dengan baik jika mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

## 4.6 Perkembangan Demokrasi di NTB

Menurut konsep demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka yang mewakili rakyat yang dipilih di bawah sistem pemerintahan. Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Namun secara praktik di lapangan demokrasi diterapkan secara berbeda-beda. Penerapan demokrasi beragam, sering kali diterapkan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan demokrasi di suatu wilayah dan terdapat keterbandingan antarwilayah diperlukan instrumen yang universal.

*Freedom House* melakukan pengukuran demokrasi pada tahun 1972 menggunakan klasifikasi *free countries*, *partly free countries*, dan *non free countries*. Sejak tahun 2008, Negara Indonesia termasuk dalam *free countries*, sementara sebelumnya digolongkan dalam negara *partly free countries*. Untuk mengukur pembangunan demokrasi sampai level provinsi, sejak tahun 2007, Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi yang berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

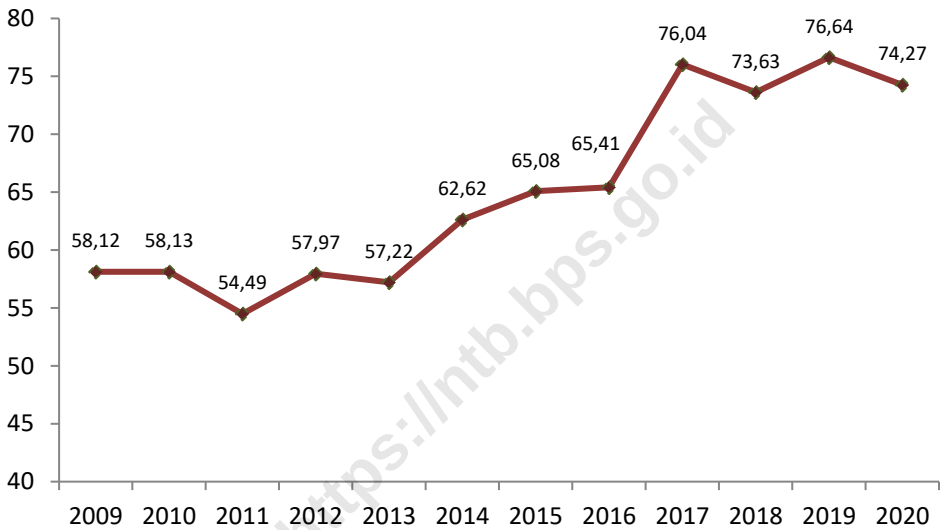
Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *focus group discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi dan indeks pusat; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain.

Pada tahun 2021, BPS mulai mengembangkan penghitungan IDI menggunakan metode baru. Penghitungan IDI menggunakan metode baru mewakili tiga dimensi yaitu dimensi politik, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial. Ketiga dimensi itu dihitung dari 22 indikator yang memberikan kontribusi terhadap 3 aspek IDI. Tiga aspek IDI dengan metode baru yaitu aspek Kebebasan, aspek Kesenjangan, dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Penghitungan IDI menggunakan metode baru, yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, menyebabkan nilai IDI tahun 2021-2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Potret demokrasi di NTB tetap dapat dilihat dari nilai IDI NTB. Tingkat

demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni ‘rendah’ (indeks < 60), ‘sedang’ (indeks 60 – 80), dan ‘tinggi’ (indeks >80). Sejak tahun 2009 IDI NTB mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini sangat tergantung pada peran serta pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan demokrasi.



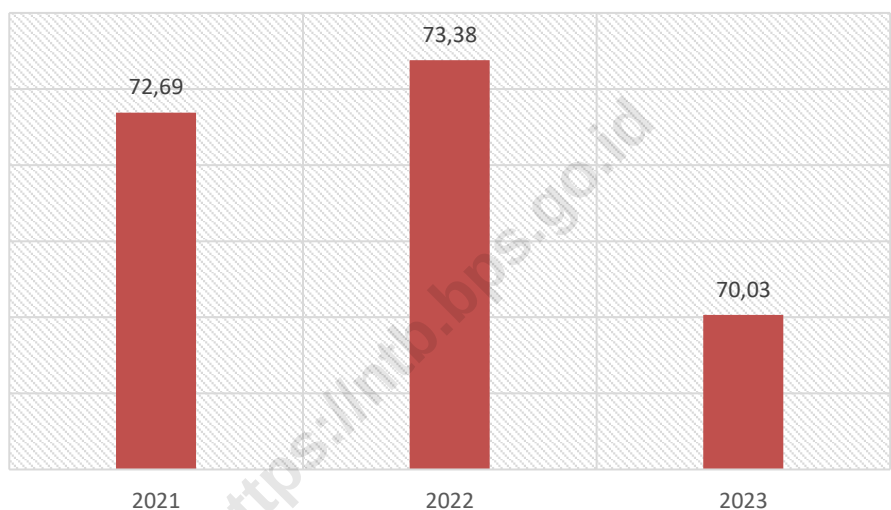
Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 4.6. Perkembangan Indeks Demokrasi NTB, 2009 – 2020**

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2014, tingkat demokrasi di provinsi NTB dapat dikategorikan sedang. Hal ini tentunya lebih baik dari tahun 2009-2013, yang mana nilai IDI NTB masih berada dikategori rendah yaitu kurang dari 60. Selain itu, nilai IDI NTB tertinggi adalah pada tahun 2019 yaitu mencapai 76,64.

Penghitungan IDI dengan menggunakan metode baru, mulai dilakukan sejak tahun 2021. Hal ini menyebabkan nilai IDI sejak tahun

2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara kategori, indeks demokrasi di Provinsi NTB tahun 2023, masih dalam kategori sedang, yaitu mencapai 70,03. Akan tetapi nilai IDI NTB tahun 2023 ini merupakan nilai terendah dalam tiga tahun terakhir. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

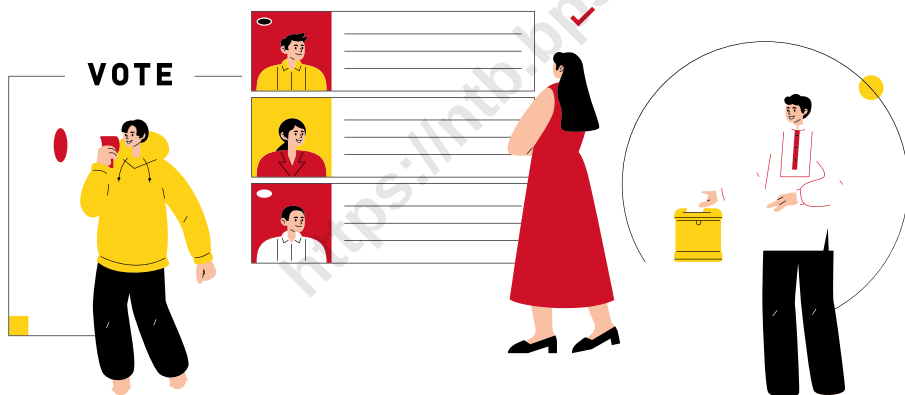
**Gambar 4.7. Nilai Indeks Demokrasi NTB, 2021 – 2023**

Berdasarkan tabel pada lampiran 18, dapat dilihat bahwa turunnya nilai IDI NTB tahun 2023 disebabkan oleh turunnya nilai pada indikator 2 yaitu Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat dari sebelumnya di atas 60 menjadi 9,60. Selain itu, terdapat juga penurunan pada indikator 15 yaitu Kinerja Lembaga Legislatif yang dilihat dari persentase perda yang merupakan inisiasi DPRD terhadap target propemperda. Hal ini

mengindikasikan masih kurang aktifnya peran Lembaga Legislatif di Provinsi NTB dalam mempengaruhi pemerintahan. Selain dua indikator tersebut, indikator 22 yaitu Pendidikan Politik pada kader partai politik juga merupakan salah satu indikator yang bernilai rendah sebesar 28,33. Hal ini dapat disebabkan karena pada tahun 2023 partai politik tengah disibukkan dengan persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 sehingga kegiatan kaderisasi partai tidak banyak diselenggarakan.

Berdasarkan aspek penyusunnya, pada tahun 2023, ketiga aspek penyusun IDI NTB bernilai “sedang”. Aspek Kebebasan bernilai 64,49; aspek Kesenjangan bernilai 79,26; dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi bernilai 64,46. Secara lebih mendalam, kinerja demokrasi dapat dilihat dari indikator penyusunnya. Pada tahun 2023, terdapat 6 indikator IDI NTB yang bernilai “rendah”, 10 indikator bernilai “sedang”, dan 6 indikator bernilai “tinggi”. Enam indikator yang bernilai “rendah” yaitu indikator 2, 6, 15, 17, 18, dan indikator 22. Selanjutnya indikator yang bernilai “tinggi” yaitu indikator 1, 11, 12, 13, 16, dan indikator 20.

# LAMPIRAN TABEL





Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

| Kabupaten/Kota             | Luas<br>(km <sup>2</sup> ) | Jumlah<br>Kecamatan | Jumlah Desa  | Jumlah<br>Penduduk |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| (1)                        | (2)                        | (3)                 | (4)          | (5)                |
| Lombok Barat               | 1.053,87                   | 10                  | 122          | 753.641            |
| Lombok Tengah              | 1.208,39                   | 12                  | 154          | 1.089.736          |
| Lombok Timur               | 1.605,55                   | 21                  | 254          | 1.391.382          |
| Sumbawa                    | 6.643,98                   | 24                  | 165          | 529.487            |
| D o m p u                  | 2.321,55                   | 8                   | 81           | 247.188            |
| B i m a                    | 4.389,40                   | 18                  | 191          | 535.530            |
| Sumbawa Barat              | 1.849,02                   | 8                   | 65           | 152.948            |
| Lombok Utara               | 809,53                     | 5                   | 43           | 257.866            |
| Kota Mataram               | 61,30                      | 6                   | 50           | 441.147            |
| Kota Bima                  | 222,25                     | 5                   | 41           | 161.362            |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> | <b>20.164,84</b>           | <b>117</b>          | <b>1.166</b> | <b>5.560.287</b>   |

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2. Jumlah PAW Anggota DPRD Menurut Alasan Berhenti pada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

| Kabupaten/Kota             | Mengundurkan Diri | Meninggal | Diberhentikan |
|----------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| (1)                        | (2)               | (3)       | (4)           |
| Lombok Barat               | 0                 | 0         | 3             |
| Lombok Tengah              | 2                 | 0         | 1             |
| Lombok Timur               | 0                 | 2         | 0             |
| Sumbawa                    | 1                 | 0         | 2             |
| D o m p u                  | 0                 | 1         | 2             |
| B i m a                    | -                 | -         | -             |
| Sumbawa Barat              | -                 | -         | -             |
| Lombok Utara               | -                 | -         | -             |
| Kota Mataram               | -                 | -         | -             |
| Kota Bima                  | -                 | -         | -             |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>3</b>      |

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2024

Tabel 3. Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

| Kabupaten/Kota             | Laki-laki | Perempuan | Jumlah    |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| (1)                        | (2)       | (3)       | (4)       |
| Lombok Barat               | 40        | 5         | 45        |
| Lombok Tengah              | 46        | 4         | 50        |
| Lombok Timur               | 45        | 5         | 50        |
| Sumbawa                    | 39        | 6         | 45        |
| D o m p u                  | 27        | 3         | 30        |
| B i m a                    | 42        | 3         | 45        |
| Sumbawa Barat              | 23        | 2         | 25        |
| Lombok Utara               | 29        | 1         | 30        |
| Kota Mataram               | 30        | 10        | 40        |
| Kota Bima                  | 20        | 3         | 23        |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> | <b>63</b> | <b>1</b>  | <b>64</b> |

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2024

Tabel 4. Jumlah Peraturan Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2023

| Kabupaten/Kota             | Jumlah Peraturan Daerah yang disahkan | Jumlah Peraturan Daerah target Propemperda | Jumlah Peraturan Daerah inisiatif DPRD |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| (1)                        | (2)                                   | (3)                                        | (4)                                    |
| Lombok Barat               | 5                                     | 11                                         | 1                                      |
| Lombok Tengah              | 5                                     | 14                                         | 0                                      |
| Lombok Timur               | 15                                    | 14                                         | 1                                      |
| Sumbawa                    | 10                                    | 37                                         | 4                                      |
| D o m p u                  | 9                                     | 11                                         | 2                                      |
| B i m a                    | 8                                     | 14                                         | 2                                      |
| Sumbawa Barat              | 8                                     | 27                                         | 0                                      |
| Lombok Utara               | 8                                     | 20                                         | 0                                      |
| Kota Mataram               | 9                                     | 16                                         | 3                                      |
| Kota Bima                  | 6                                     | 22                                         | 0                                      |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> | <b>2</b>                              | <b>28</b>                                  | <b>13</b>                              |

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2024

Tabel 5. Jumlah Kegiatan Kaderisasi Partai Politik yang Tercatat di Bakesbangpol Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2023

| Kabupaten/Kota             | Kegiatan Kaderisasi Partai Politik |
|----------------------------|------------------------------------|
| (1)                        | (2)                                |
| Lombok Barat               | -                                  |
| Lombok Tengah              | -                                  |
| Lombok Timur               | 136                                |
| Sumbawa                    | 56                                 |
| D o m p u                  | 0                                  |
| B i m a                    | -                                  |
| Sumbawa Barat              | -                                  |
| Lombok Utara               | 27                                 |
| Kota Mataram               | -                                  |
| Kota Bima                  | 22                                 |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> | <b>17</b>                          |

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2024

Tabel 6. Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019

| Kabupaten/Kota             | Jumlah DPT       |
|----------------------------|------------------|
| (1)                        | (2)              |
| Lombok Barat               | 479.882          |
| Lombok Tengah              | 760.482          |
| Lombok Timur               | 906.094          |
| Sumbawa                    | 330.637          |
| D o m p u                  | 162.180          |
| B i m a                    | 365.795          |
| Sumbawa Barat              | 89.442           |
| Lombok Utara               | 171.541          |
| Kota Mataram               | 293.192          |
| Kota Bima                  | 108.008          |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> | <b>3.667.253</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 7. Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019

| Kabupaten/Kota             | Jumlah DPTb   |
|----------------------------|---------------|
| (1)                        | (2)           |
| Lombok Barat               | 825           |
| Lombok Tengah              | 985           |
| Lombok Timur               | 1.981         |
| Sumbawa                    | 2.947         |
| D o m p u                  | 475           |
| B i m a                    | 757           |
| Sumbawa Barat              | 969           |
| Lombok Utara               | 143           |
| Kota Mataram               | 3.576         |
| Kota Bima                  | 798           |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> | <b>13.456</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 8. Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019

| Kabupaten/Kota             | Jumlah DPK     |
|----------------------------|----------------|
| (1)                        | (2)            |
| Lombok Barat               | 19.631         |
| Lombok Tengah              | 18.560         |
| Lombok Timur               | 24.939         |
| Sumbawa                    | 7.744          |
| D o m p u                  | 7.516          |
| B i m a                    | 7.957          |
| Sumbawa Barat              | 2.773          |
| Lombok Utara               | 3.788          |
| Kota Mataram               | 15.217         |
| Kota Bima                  | 3.222          |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> | <b>111.347</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 9. Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019

| Kabupaten/Kota             | Jumlah DPT       | Jumlah Pemilih     |                             | Voters Turn out |
|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
|                            |                  | Pengguna Hak Pilih | Tidak Menggunakan Hak Pilih |                 |
| (1)                        | (2)              | (3)                | (4)                         | (5)             |
| Lombok Barat               | 479.882          | 414.825            | 65.057                      | 86,44           |
| Lombok Tengah              | 760.482          | 606.800            | 153.682                     | 79,79           |
| Lombok Timur               | 906.094          | 725.572            | 180.522                     | 80,08           |
| Sumbawa                    | 330.637          | 280.692            | 49.945                      | 84,89           |
| D o m p u                  | 162.180          | 144.966            | 17.214                      | 89,39           |
| B i m a                    | 365.795          | 290.113            | 75.682                      | 79,31           |
| Sumbawa Barat              | 89.442           | 80.290             | 9.152                       | 89,77           |
| Lombok Utara               | 171.541          | 136.589            | 34.952                      | 79,62           |
| Kota Mataram               | 293.192          | 250.335            | 42.857                      | 85,38           |
| Kota Bima                  | 108.008          | 92.294             | 15.714                      | 85,45           |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> | <b>3.667.253</b> | <b>3.034.763</b>   | <b>632.490</b>              | <b>82,75</b>    |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 10. Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019

| Kabupaten/Kota             | Perolehan Suara |              |                  |              |
|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
|                            | Jokowi-Amin     |              | Prabowo-Sandi    |              |
|                            | Jumlah          | Persentase   | Jumlah           | Persentase   |
| (1)                        | (2)             | (3)          | (4)              | (5)          |
| Lombok Barat               | 106.322         | 26,52        | 294.638          | 73,48        |
| Lombok Tengah              | 169.565         | 28,68        | 421.653          | 71,32        |
| Lombok Timur               | 281.160         | 39,67        | 427.670          | 60,33        |
| Sumbawa                    | 105.358         | 38,16        | 170.746          | 61,84        |
| D o m p u                  | 37.767          | 26,60        | 104.192          | 73,40        |
| B i m a                    | 43.556          | 15,36        | 240.083          | 84,64        |
| Sumbawa Barat              | 29.641          | 37,61        | 49.165           | 62,39        |
| Lombok Utara               | 70.812          | 49,87        | 71.183           | 50,13        |
| Kota Mataram               | 91.417          | 36,89        | 156.413          | 63,11        |
| Kota Bima                  | 15.644          | 17,15        | 75.576           | 82,85        |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> | <b>951.242</b>  | <b>32,11</b> | <b>2.011.319</b> | <b>67,89</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 11. Jumlah Pemilih Pada Pemilu 2024 Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin

| Provinsi                  | Laki-Laki          | Perempuan          | Jumlah             |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Dalam Negeri</b>       | <b>101.467.243</b> | <b>101.589.505</b> | <b>203.056.748</b> |
| Aceh                      | 1.839.412          | 1.902.625          | 3.742.037          |
| Sumatera Utara            | 5.360.844          | 5.493.096          | 10.853.940         |
| Sumatera Barat            | 2.027.360          | 2.061.246          | 4.088.606          |
| Riau                      | 2.399.163          | 2.333.011          | 4.732.174          |
| Jambi                     | 1.350.151          | 1.325.956          | 2.676.107          |
| Sumatera Selatan          | 3.192.292          | 3.134.056          | 6.326.348          |
| Bengkulu                  | 754.855            | 739.973            | 1.494.828          |
| Lampung                   | 3.326.334          | 3.212.794          | 6.539.128          |
| Kepulauan Bangka Belitung | 543.663            | 523.771            | 1.067.434          |
| Kepulauan Riau            | 753.535            | 747.439            | 1.500.974          |
| DKI Jakarta               | 4.080.601          | 4.172.296          | 8.252.897          |
| Jawa Barat                | 17.958.814         | 17.756.087         | 35.714.901         |
| Jawa Tengah               | 14.113.893         | 14.175.520         | 28.289.413         |
| DI Yogyakarta             | 1.397.099          | 1.473.875          | 2.870.974          |
| Jawa Timur                | 15.495.556         | 15.907.282         | 31.402.838         |
| Banten                    | 4.460.176          | 4.382.470          | 8.842.646          |
| Bali                      | 1.617.276          | 1.652.240          | 3.269.516          |
| Nusa Tenggara Barat       | 1.916.798          | 2.001.493          | 3.918.291          |
| Nusa Tenggara Timur       | 1.971.831          | 2.036.644          | 4.008.475          |
| Kalimantan Barat          | 2.017.565          | 1.940.996          | 3.958.561          |
| Kalimantan Tengah         | 995.097            | 940.019            | 1.935.116          |
| Kalimantan Selatan        | 1.512.186          | 1.513.034          | 3.025.220          |
| Kalimantan Timur          | 1.435.916          | 1.342.728          | 2.778.644          |
| Kalimantan Utara          | 263.000            | 241.252            | 504.252            |
| Sulawesi Utara            | 993.863            | 975.740            | 1.969.603          |
| Sulawesi Tengah           | 1.140.466          | 1.096.237          | 2.236.703          |
| Sulawesi Selatan          | 3.244.626          | 3.425.956          | 6.670.582          |
| Sulawesi Tenggara         | 931.298            | 936.633            | 1.867.931          |
| Gorontalo                 | 438.682            | 442.524            | 881.206            |

Lanjutan Tabel 11.

| Provinsi           | Laki-Laki          | Perempuan          | Jumlah             |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sulawesi Barat     | 494.660            | 491.100            | 985.760            |
| Maluku             | 658.058            | 682.954            | 1.341.012          |
| Maluku Utara       | 490.478            | 463.500            | 953.978            |
| Papua Barat        | 196.570            | 188.895            | 385.465            |
| Papua              | 370.861            | 356.974            | 727.835            |
| Papua Selatan      | 190.310            | 176.959            | 367.269            |
| Papua Tengah       | 604.549            | 524.295            | 1.128.844          |
| Papua Pegunungan   | 701.582            | 604.832            | 1.306.414          |
| Papua Barat Daya   | 227.823            | 213.003            | 440.826            |
| <b>Luar Negeri</b> | <b>751.260</b>     | <b>999.214</b>     | <b>1.750.474</b>   |
| <b>Jumlah</b>      | <b>101.467.243</b> | <b>101.589.505</b> | <b>203.056.748</b> |

Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023

Tabel 12. Jumlah Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024 Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin

| Provinsi                  | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah  |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| Aceh                      | 14.268    | 13.302    | 27.570  |
| Sumatera Utara            | 18.422    | 16.475    | 34.897  |
| Sumatera Barat            | 15.407    | 16.457    | 31.864  |
| Riau                      | 8.552     | 8.137     | 16.689  |
| Jambi                     | 6.030     | 5.865     | 11.895  |
| Sumatera Selatan          | 13.789    | 12.499    | 26.288  |
| Bengkulu                  | 4.694     | 4.503     | 9.197   |
| Lampung                   | 18.434    | 16.901    | 35.335  |
| Kepulauan Bangka Belitung | 3.899     | 3.847     | 7.746   |
| Kepulauan Riau            | 3.245     | 3.231     | 6.476   |
| DKI Jakarta               | 34.087    | 27.659    | 61.746  |
| Jawa Barat                | 74.036    | 72.715    | 146.751 |
| Jawa Tengah               | 94.040    | 93.461    | 187.501 |
| DI Yogyakarta             | 15.007    | 15.496    | 30.503  |
| Jawa Timur                | 78.797    | 82.831    | 161.628 |
| Banten                    | 15.143    | 14.261    | 29.404  |
| Bali                      | 10.808    | 9.620     | 20.428  |
| Nusa Tenggara Barat       | 10.962    | 12.317    | 23.279  |
| Nusa Tenggara Timur       | 22.081    | 24.170    | 46.251  |
| Kalimantan Barat          | 11.841    | 10.820    | 22.661  |
| Kalimantan Tengah         | 5.241     | 5.013     | 10.254  |
| Kalimantan Selatan        | 10.805    | 10.868    | 21.673  |
| Kalimantan Timur          | 6.181     | 5.650     | 11.831  |
| Kalimantan Utara          | 1.158     | 1.047     | 2.205   |
| Sulawesi Utara            | 6.917     | 6.466     | 13.383  |
| Sulawesi Tengah           | 6.849     | 6.685     | 13.534  |
| Sulawesi Selatan          | 24.657    | 29.094    | 53.751  |
| Sulawesi Tenggara         | 7.450     | 8.210     | 15.660  |
| Gorontalo                 | 3.749     | 4.174     | 7.923   |

Lanjutan Tabel 12.

| Provinsi         | Laki-Laki      | Perempuan      | Jumlah           |
|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Sulawesi Barat   | 4.212          | 7.883          | 12.095           |
| Maluku           | 2.861          | 2.812          | 5.673            |
| Maluku Utara     | 1.658          | 1.395          | 3.053            |
| Papua Barat      | 469            | 301            | 770              |
| Papua            | 780            | 571            | 1.351            |
| Papua Selatan    | 334            | 222            | 556              |
| Papua Tengah     | 692            | 508            | 1.200            |
| Papua Pegunungan | 178            | 142            | 320              |
| Papua Barat Daya | 349            | 346            | 695              |
| <b>Jumlah</b>    | <b>558.082</b> | <b>555.954</b> | <b>1.114.036</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 13. Jumlah Calon Tetap Anggota DPR RI Pada Pemilu 2024 Menurut Partai

| Partai                                | Akronim          | Laki-<br>Laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------|--------|
| (1)                                   | (2)              | (3)           | (4)       | (5)    |
| Partai Kebangkitan Bangsa             | PKB              | 376           | 204       | 580    |
| Partai Gerakan Indonesia Raya         | Gerindra         | 370           | 210       | 580    |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI Perjuangan   | 388           | 192       | 580    |
| Partai Golongan Karya                 | Golkar           | 383           | 197       | 580    |
| Partai Nasdem                         | NasDem           | 380           | 200       | 580    |
| Partai Buruh                          | Buruh            | 370           | 210       | 580    |
| Partai Gelombang Rakyat Indonesia     | Gelora Indonesia | 253           | 143       | 396    |
| Partai Keadilan Sejahtera             | PKS              | 367           | 213       | 580    |
| Partai Kebangkitan Nusantara          | PKN              | 327           | 198       | 525    |
| Partai Hati Nurani Rakyat             | Hanura           | 298           | 187       | 485    |
| Partai Garda Republik Indonesia       | Garuda           | 334           | 236       | 570    |
| Partai Amanat Nasional                | PAN              | 364           | 216       | 580    |
| Partai Bulan Bintang                  | PBB              | 277           | 193       | 470    |
| Partai Demokrat                       | Demokrat         | 378           | 202       | 580    |
| Partai Solidaritas Indonesia          | PSI              | 355           | 225       | 580    |
| Partai Perindo                        | Perindo          | 348           | 231       | 579    |
| Partai Persatuan Pembangunan          | PPP              | 366           | 214       | 580    |
| Partai Ummat                          | Ummat            | 307           | 205       | 512    |

Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023

Tabel 14. Jumlah Dapil Pada Pemilu 2024 Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin

| Provinsi                  | DPR RI | DPD | DPRD Provinsi | DPRD Kabupaten/Kota |
|---------------------------|--------|-----|---------------|---------------------|
| Aceh                      | 2      | 1   | 10            | 100                 |
| Sumatera Utara            | 3      | 1   | 12            | 145                 |
| Sumatera Barat            | 2      | 1   | 8             | 75                  |
| Riau                      | 2      | 1   | 8             | 65                  |
| Jambi                     | 1      | 1   | 6             | 47                  |
| Sumatera Selatan          | 2      | 1   | 10            | 87                  |
| Bengkulu                  | 1      | 1   | 7             | 36                  |
| Lampung                   | 2      | 1   | 8             | 84                  |
| Kepulauan Bangka Belitung | 1      | 1   | 6             | 27                  |
| Kepulauan Riau            | 1      | 1   | 7             | 28                  |
| DKI Jakarta               | 3      | 1   | 12            | -                   |
| Jawa Barat                | 11     | 1   | 15            | 153                 |
| Jawa Tengah               | 10     | 1   | 13            | 186                 |
| DI Yogyakarta             | 1      | 1   | 7             | 27                  |
| Jawa Timur                | 11     | 1   | 14            | 216                 |
| Banten                    | 3      | 1   | 12            | 44                  |
| Bali                      | 1      | 1   | 9             | 51                  |
| Nusa Tenggara Barat       | 2      | 1   | 8             | 50                  |
| Nusa Tenggara Timur       | 2      | 1   | 8             | 93                  |
| Kalimantan Barat          | 2      | 1   | 8             | 70                  |
| Kalimantan Tengah         | 1      | 1   | 5             | 48                  |
| Kalimantan Selatan        | 2      | 1   | 7             | 53                  |
| Kalimantan Timur          | 1      | 1   | 6             | 42                  |
| Kalimantan Utara          | 1      | 1   | 4             | 15                  |
| Sulawesi Utara            | 1      | 1   | 6             | 60                  |
| Sulawesi Tengah           | 1      | 1   | 7             | 51                  |
| Sulawesi Selatan          | 3      | 1   | 11            | 122                 |
| Sulawesi Tenggara         | 1      | 1   | 6             | 71                  |
| Gorontalo                 | 1      | 1   | 6             | 28                  |

Lanjutan Tabel 14.

| Provinsi         | DPR RI    | DPD       | DPRD<br>Provinsi | DPRD<br>Kabupaten/Kota |
|------------------|-----------|-----------|------------------|------------------------|
| Sulawesi Barat   | 1         | 1         | 7                | 1                      |
| Maluku           | 1         | 1         | 7                | 1                      |
| Maluku Utara     | 1         | 1         | 5                | 1                      |
| Papua Barat      | 1         | 1         | 5                | 1                      |
| Papua            | 1         | 1         | 7                | 1                      |
| Papua Selatan    | 1         | 1         | 5                | 1                      |
| Papua Tengah     | 1         | 1         | 8                | 1                      |
| Papua Pegunungan | 1         | 1         | 7                | 1                      |
| Papua Barat Daya | 1         | 1         | 6                | 1                      |
| <b>Jumlah</b>    | <b>84</b> | <b>38</b> | <b>303</b>       | <b>84</b>              |

Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023

Tabel 15. Jumlah Kursi Pada Pemilu 2024 Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin

| Provinsi                  | DPR RI | DPD | DPRD Provinsi | DPRD Kabupaten/Kota |
|---------------------------|--------|-----|---------------|---------------------|
| Aceh                      | 13     | 4   | 81            | 665                 |
| Sumatera Utara            | 30     | 4   | 100           | 1125                |
| Sumatera Barat            | 14     | 4   | 65            | 590                 |
| Riau                      | 13     | 4   | 65            | 495                 |
| Jambi                     | 8      | 4   | 55            | 375                 |
| Sumatera Selatan          | 17     | 4   | 75            | 630                 |
| Bengkulu                  | 4      | 4   | 45            | 275                 |
| Lampung                   | 20     | 4   | 85            | 600                 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 3      | 4   | 45            | 205                 |
| Kepulauan Riau            | 4      | 4   | 45            | 200                 |
| DKI Jakarta               | 21     | 4   | 106           | -                   |
| Jawa Barat                | 91     | 4   | 120           | 1295                |
| Jawa Tengah               | 77     | 4   | 120           | 1610                |
| DI Yogyakarta             | 8      | 4   | 55            | 220                 |
| Jawa Timur                | 87     | 4   | 120           | 1695                |
| Banten                    | 22     | 4   | 100           | 390                 |
| Bali                      | 9      | 4   | 55            | 360                 |
| Nusa Tenggara Barat       | 11     | 4   | 65            | 385                 |
| Nusa Tenggara Timur       | 13     | 4   | 65            | 650                 |
| Kalimantan Barat          | 12     | 4   | 65            | 510                 |
| Kalimantan Tengah         | 6      | 4   | 45            | 385                 |
| Kalimantan Selatan        | 11     | 4   | 55            | 430                 |
| Kalimantan Timur          | 8      | 4   | 55            | 330                 |
| Kalimantan Utara          | 3      | 4   | 35            | 125                 |
| Sulawesi Utara            | 6      | 4   | 45            | 400                 |
| Sulawesi Tengah           | 7      | 4   | 55            | 380                 |
| Sulawesi Selatan          | 24     | 4   | 85            | 825                 |
| Sulawesi Tenggara         | 6      | 4   | 45            | 440                 |
| Gorontalo                 | 3      | 4   | 45            | 170                 |

Lanjutan Tabel 15.

| Provinsi         | DPR RI     | DPD        | DPRD<br>Provinsi | DPRD<br>Kabupaten/Kota |
|------------------|------------|------------|------------------|------------------------|
| Sulawesi Barat   | 4          | 4          | 45               | 170                    |
| Maluku           | 4          | 4          | 45               | 290                    |
| Maluku Utara     | 3          | 4          | 45               | 245                    |
| Papua Barat      | 3          | 4          | 35               | 150                    |
| Papua            | 3          | 4          | 45               | 215                    |
| Papua Selatan    | 3          | 4          | 35               | 100                    |
| Papua Tengah     | 3          | 4          | 45               | 210                    |
| Papua Pegunungan | 3          | 4          | 45               | 220                    |
| Papua Barat Daya | 3          | 4          | 35               | 135                    |
| <b>Jumlah</b>    | <b>580</b> | <b>152</b> | <b>2372</b>      | <b>17.495</b>          |

Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023

Tabel 16. Daftar Kepala Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2023

| Kabupaten/Kota                 | Nama                                | Status Jabatan                    | Jenis Kelamin    |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| (1)                            | (2)                                 | (3)                               | (4)              |
| Lombok Barat                   | Hj Sumiatun                         | Kepala Daerah                     | Perempuan        |
| Lombok Tengah                  | H. Lalu Pathul Bahri,<br>S.IP, M.AP | Kepala Daerah                     | Laki-laki        |
| Lombok Timur                   | Drs. H. Juaini Taofik,<br>M.AP      | Kepala Daerah                     | Laki-laki        |
| Sumbawa                        | Drs. H. Mahmud<br>Abdullah          | Kepala Daerah                     | Laki-laki        |
| D o m p u                      | H. Kader Jaelani                    | Kepala Daerah                     | Laki-laki        |
| B i m a                        | Hj. Indah Dhamayanti<br>Putri, S.E. | Kepala Daerah                     | Perempuan        |
| Sumbawa Barat                  | Dr. Ir. H. W. Musyafirin,<br>MM     | Kepala Daerah                     | Laki-laki        |
| Lombok Utara                   | H. Djohan Sjamsu, S.H               | Kepala Daerah                     | Laki-laki        |
| Kota Mataram                   | H. Mohan Roliskana                  | Kepala Daerah                     | Laki-laki        |
| Kota Bima                      | Mohammad Rum                        | Penjabat Kepala<br>Daerah         | Laki-laki        |
| <b>Nusa Tenggara<br/>Barat</b> | <b>H. Lalu Gita Ariadi</b>          | <b>Penjabat Kepala<br/>Daerah</b> | <b>Laki-laki</b> |

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2024

Tabel 17. Jumlah Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang Mendaftar dan Total Terdaftar di Bakesbangpoldagri Provinsi dan Kabupaten/Kota NTB Tahun 2023

| Kabupaten/Kota             | Ormas/LSM yang Mendaftar Tahun Ini | Total Ormas/LSM Terdaftar |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| (1)                        | (2)                                | (3)                       |
| Lombok Barat               | 38                                 | 119                       |
| Lombok Tengah              | 15                                 | 267                       |
| Lombok Timur               | 15                                 | 160                       |
| Sumbawa                    | 32                                 | 106                       |
| D o m p u                  | 225                                | 225                       |
| B i m a                    | 33                                 | 197                       |
| Sumbawa Barat              | 7                                  | 77                        |
| Lombok Utara               | 3                                  | 3                         |
| Kota Mataram               | 13                                 | 13                        |
| Kota Bima                  | 18                                 | 150                       |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> | <b>30</b>                          | <b>443</b>                |

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2024

Tabel 18. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTB Tahun 2021-2023

| Deskripsi/Tahun |                                                                                                                | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                 |                                                                                                                | Capaian | Capaian | Capaian |
| IDI Komposit    |                                                                                                                | 72,69   | 73,38   | 70,03   |
| Aspek 1         | <b>Kebebasan</b>                                                                                               | 77,41   | 76,75   | 64,49   |
| 1               | Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara                   | 83,93   | 89,48   | 89,67   |
| 2               | Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat                     | 86,61   | 60,54   | 9,60    |
| 3               | Terjaminnya kebebasan berkeyakinan                                                                             | 82,15   | 91,23   | 65,56   |
| 4               | Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan | 72,73   | 72,73   | 72,73   |
| 5               | Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu                                                               | 78,27   | 78,27   | 78,27   |
| 6               | Pemenuhan hak-hak pekerja                                                                                      | 54,07   | 54,78   | 50,67   |
| 7               | Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya                                                          | 79,33   | 79,62   | 72,89   |
| Aspek 2         | <b>Kesetaraan</b>                                                                                              | 80,15   | 77,24   | 79,26   |
| 8               | Kesetaraan Gender                                                                                              | 69,28   | 70,51   | 70,26   |
| 9               | Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan                           | 100,00  | 67,69   | 76,92   |
| 10              | Anti monopoli sumber daya ekonomi                                                                              | 62,00   | 64,00   | 68,33   |
| 11              | Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial                                                        | 83,92   | 81,29   | 80,15   |
| 12              | Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah                                                                      | 96,99   | 97,11   | 97,20   |
| 13              | Akses masyarakat terhadap informasi publik                                                                     | 77,64   | 83,72   | 85,86   |
| 14              | Kesetaraan dalam pelayanan dasar                                                                               | 75,49   | 76,85   | 77,34   |

Lanjutan Tabel 18.

| Deskripsi/Tahun |                                                                                                 | 2021         | 2022         | 2023         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                                                                                                 | Capaian      | Capaian      | Capaian      |
| IDI Komposit    |                                                                                                 | 72,69        | 73,38        | 70,03        |
| Aspek 3         | <b>Kapasitas Lembaga Demokrasi</b>                                                              | <b>59,10</b> | <b>65,44</b> | <b>64,46</b> |
| 15              | Kinerja Lembaga Legislatif                                                                      | 60,00        | 28,57        | 15,38        |
| 16              | Kinerja Lembaga Yudikatif                                                                       | 87,66        | 86,06        | 82,48        |
| 17              | Netralitas Penyelenggara Pemilu                                                                 | 54,55        | 54,55        | 54,55        |
| 18              | Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah                | 27,27        | 18,18        | 59,09        |
| 19              | Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat | 68,89        | 70,56        | 71,92        |
| 20              | Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah                  | 42,86        | 100,00       | 100,00       |
| 21              | Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik                                                        | 70,80        | 74,20        | 79,40        |
| 22              | Pendidikan Politik pada kader partai politik                                                    | 43,33        | 66,67        | 28,33        |



# D A T A

## MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dr. Sudjono No.74 Mataram 83361  
Telp. (0370) 621385, Fax. (0370) 623801  
Homepage : <http://ntb.bps.go.id> Email : [ntb@bps.go.id](mailto:ntb@bps.go.id)

